

JARINGAN TATA AIR PENGEMBANGAN RAWA (Suatu Pengalaman Dari Kinerja Dan Manfaatnya)

**Darmanto,
Pusat Studi Sumberdaya Lahan, UGM**

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan rawa, jaringan tata air merupakan prasarana yang sangat vital untuk mengatur keberadaan air disuatu tempat/wilayah. Peran jaringan tata air baik yang alamiah maupun buatan, terkait dengan fungsi saluran, sehingga permasalahannya menjadi sangat kompleks. Dengan demikian dalam pengembangan rawa, pertimbangan pembangunan jaringan tata air harus selalu memperhatikan banyak hal.

Pengalaman menunjukkan bahwa konflik kepentingan akan memunculkan konflik kriteria teknis jaringan tata air, sehingga diperlukan kajian yang serba cakup dan berkelanjutan didalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Peran fungsi lahan dan jaringan itu sendiri didalam memenuhi maksud dan tujuan pengembangan rawa, selalu akan berpengaruh cukup berarti terhadap penilaian kinerja serta manfaatnya. Hal ini menjadikan permasalahannya menjadi dinamis seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan peran jaringan terkait dengan perubahan tata guna lahan serta persepsi masyarakatnya.

Didalam melayani budidaya pertanian dalam arti luas, fungsi tata air yang berkaitan dengan keberadaan air dan dinamikanya di lahan sangat menentukan proses kesiapan tanah, tingkat kecukupan jumlah dan kesesuaian kualitas airnya didalam mendukung produktivitas lahan. Oleh sebab itu didalam kajiannya tidak dapat lepas dari perilaku dinamika hidrometeorologi setempat maupun kemampuan teknologi yang diterapkan untuk mengatur keberadaan air di lahan. Selain itu faktor kualitas sumberdaya manusia setempat juga akan sangat menentukan, disamping faktor lain yang terkait.

Keunikan kondisi ekosistem lingkungan dan kearifan masyarakat setempat, yang didalam interaksinya telah berlangsung dan teruji dalam kurun waktu lama, perlu diperhatikan secara proporsional didalam pengembangan rawa. Inovasi yang dikembangkan harus memperhatikan nilai nilai sosial-ekonomi-budaya setempat agar diperoleh nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Resiko yang mungkin terjadi harus dapat diantisipasi melalui langkah struktural maupun nonstruktural.

Terkait dengan tujuan pengembangan lahan rawa di Indonesia secara makro, maka aspek konservasi sumberdaya alam rawa, tata ruang wilayah pembangunan regional maupun nasional, upaya menekan kemungkinan munculnya daya rusak dan perilaku dinamis budidaya masyarakatnya, maka peran serta masyarakat menjadi

sangat penting. Untuk itu pengembangan rawa kedepan harus mengedepankan sinergi antara keinginan masyarakat, pemerintah maupun pihak pengembang lainnya, sehingga komunikasi diantaranya dan partisipasi masyarakat menjadi penting. Dengan demikian program pendidikan kepada masyarakat akan menjadi keharusan.

SELINTAS KENANGAN

Manusia, adalah makhluk Tuhan yang dibekali akal dan nurani, agar memberdayakan alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kita mengetahui bahwa alam sekitar itu terbatas sedang kebutuhan manusia terus berubah dan bertambah, sehingga kearifan dalam semua usaha manusia sangat mempengaruhi keberlanjutan kehidupannya. Manusia sebagai individu yang mempunyai pamrih pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial mempunyai kepentingan paguyuban yang saling berinteraksi, dalam prosesnya akan selalu berdampak pada keseimbangan alami. Hal ini dapat dikaji dan dibuktikan dari sejarah perjalanannya dan hal ini berlaku juga di Indonesia.

Dari pengalaman kehidupan umat manusia proses peningkatan kemampuan budidaya berlangsung bertahap dan berkesinambungan seiring dengan pengembangan kualitas SDM yang ditunjang oleh kesiapan sistem kelembagaannya. Adapun sistem kelembagaan tercermin dari bentuk paguyuban yang sering tingkatannya diukur dari tatanan formal maupun informal yang dikukuhkan dalam bentuk kerajaan, negara atau dalam skala kecil adalah wilayah pengembangan propinsi atau kabupaten. Dengan demikian dalam misinya, suatu daerah selalu harus mengedepankan paradigma pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya, kegagalan dalam hal ini akan menempatkan krisis yang berakhir dengan keruntuhan eksistensinya. Kenyataan ini dapat dibuktikan dari banyak perjalanan sejarah atau pengalaman di beberapa tempat bahkan negara atau kerajaan.

Pada awal terbentuknya suatu kesatuan wilayah pembangunan selalu diawali dengan adanya dukungan dari tercukupinya sektor ketersediaan kebutuhan dasar hidup (khususnya pangan) dari masyarakatnya dan ada kehendak serta kesatuan kepentingan dari paguyuban yang berkembang. Sehingga sejarah pengembangan wilayah sering dikaitkan dengan kinerja sektor pertanian dalam menyediakan atau bahkan memproduksi pangan bagi masyarakatnya juga daerah disekitarnya. Dengan demikian paradigma pembangunan wilayah selalu memuat pengertian pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas dalam mensejahterakan masyarakatnya, yang intinya menanggulangi kemiskinan, kebodohan, kekacauan, peperangan, ketimpangan, kerusakan lingkungan dan ingin selalu meningkatkan daya saing dalam eranya. Untuk itu suatu kesatuan wilayah dalam hal ini propinsi atau kabupaten harus

mempunyai politik pembangunan yang merupakan usaha nyata dalam menghimpun potensi untuk dimanfaatkan mencapai suatu tujuan idealismenya. Adapun hasil pembangunan diharapkan mencakup aspek : peningkatan standar kualitas hidup yang tercermin dari kesejahteraan dan ketentraman kehidupan masyarakatnya. Semua itu meliputi:

1. tercukupinya kebutuhan dasar/pokok kehidupan masyarakatnya,
2. terjaminnya kesehatan lingkungan dari bahaya penyakit,
3. terjaminnya rasa aman & tenteram dari kehidupan masyarakatnya,
4. terjaminnya kebutuhan sosial kemasyarakatan yang berupa kemudahan mobilitas dalam pergaulan antar kelompok masyarakat,
5. terselenggaranya peningkatan penghasilan per kapita melalui distribusi penghasilan yang bersumber dari produktivitas kerjanya,
6. tersedianya pelayanan publik yang cukup memadai untuk menunjang kehidupan yang bermartabat, dan lain sebagainya.

Semua itu merupakan faktor penunjang terciptanya kekrasanan kelompok masyarakat untuk menetap disuatu tempat. Masyarakat ini mendambakan terselenggaranya kehidupan yang serasi dengan lingkungan hidupnya, berarti pembangunan daerahnya harus berbasis pada kondisi dan situasi lingkungannya. Dalam kasus daerah rawa di Indonesia, untuk menjaga kondisi keseimbangan ekosistem lingkungan setempat dari proses kerusakan, maka aspek pengembangan potensi rawa yang berkelanjutan harus menjadi kepedulian bersama, termasuk para pengambil kebijakan.

Sejarah dan pengalaman orang bijak mengajarkan bahwa nilai nilai kejernihan pandangan yang penuh kearifan, perlu dipunyai oleh seorang penentu kebijakan dalam pembangunan. Olah pikir dan asah budi para pemimpin harus berorientasi pada tujuan "Memayu-hayuning Bawono", yang maknanya adalah memelihara kesejahteraan umat manusia. Untuk itu para penguasa atau pemimpin harus menghayati pengetahuan tersebut agar cukup arif memberdayakan potensi daerahnya untuk mensejahterakan rakyatnya.

SEJENAK RENUNGAN

Menyimak perjalanan sejarah bangsa Indonesia, maka para pemimpin bangsa ini harus mau mempelajari fakta sejarahnya guna mendapatkan arah pembangunan daerah dengan tepat. Evaluasi diri diperlukan untuk penguasaan informasi tentang potensi daerahnya, disamping juga peran fungsinya didalam pergaulan antar daerah tetangganya. Disamping itu kondisi ekosistem lingkungan alamiahnya dan gejala perubahan tatanan sosial-ekonomi global (skala Nasional maupun Regional Asia Tenggara & Asia Pasific), dapat dipahami secara tepat.

Hasil evaluasi akan diperlukan untuk dasar penetapan langkah strategi pembangunan Daerah. Kegagalan dalam menetapkan strateginya, belajar dari sejarahnya, dapat berakibat fatal yaitu runtuhnya suatu komunitas bahkan dapat juga suatu Negara. Adapun faktor-2 yang perlu dievaluasi adalah seperti tersebut dibawah.

1. Faktor potensi sumberdaya alam penunjang ketersediaan kebutuhan pokok hidup dan habitat bagi mahluk hidup didalam proses keseimbangan ekosistemnya. Disini peran rawa secara alami sangat erat kaitannya dengan eksistensi kehidupan.
2. Faktor letak geografis, yang merupakan modal alamiah-kodratis dari suatu daerah didalam tata ruang & pergaulan antar daerah. Disini dapat diyakini bahwa rawa dapat berperan sebagai mediator interaksi berbagai kepentingan agraris-maritim-niaga, sehingga pusat perkembangan daerah dapat berada di daerah rawa.
3. Faktor sumberdaya manusia sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Kualitas, kuantitas dan komitmennya, berperan didalam proses produksi maupun untuk mendapatkan nilai tambah pada sumberdaya alam yang ada. Disini SDM ditempatkan sebagai faktor peubah potensi rawa menjadi sumber manfaat namun sebaliknya dapat juga sebagai sumber masalah ("agent of change").
4. Faktor "modal sosial" yang berupa nilai budaya masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tradisi maupun tata kelembagaan dan aturan kehidupan kolektif dari masyarakatnya. Disini modal sosial merupakan percepatan program pembangunan yang didalam proses persaingan antar daerah akan menjadi identitas daerah.
5. Faktor "modal sarana dan prasarana" pembangunan merupakan perangkat keras untuk menunjang berlangsungnya proses pembangunan. Sebagai "alat sekaligus aset", ketersediaannya harus dapat diberdayakan secara efisien dan efektif melalui manajemen aset yang didukung oleh kualitas dan budaya kerja masyarakatnya.

Kelima faktor tersebut selayaknya menjadi pusat perhatian yang interaksinya perlu di kelola untuk mendapatkan hasil kinerja yang optimal. Sebagai faktor dominan dalam mengantar pergeseran budaya dari masyarakat pemanen menjadi masyarakat berbudidaya, kelima faktor tersebut perlu dikenali keadaannya secara cermat terutama untuk menentukan arah dan strategi pembangunannya.

Globalisasi, HAM, Kerusakan Lingkungan

Sebagai isu sentral, maka ketiganya perlu dipertimbangan kedalam setiap pengambilan kebijakan. Harus diakui ketiga isu tersebut sudah pernah terjadi dan dialami oleh semua kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Ketiga isu tersebut

terbukti selalu menjadi faktor penentu dalam mendukung tercapainya kejayaan suatu kerajaan namun juga sekaligus selalu ikut secara langsung meruntuhkannya.

Globalisasi adalah faktor eksternal yang tidak akan dapat dikendalikan gejalanya. HAM adalah faktor internal-insaniah dan terkait erat dengan kemauan seluruh bangsa Indonesia untuk berintegrasi atau sebaliknya memilih disintegrasi. Sedang Kerusakan Lingkungan adalah faktor internal-alamiah yang peristiwanya mengikuti hukum alam dan tidak dapat dicegah dan akan berlangsung sesuai dengan KehendakNya. Kenyataannya ketiga isu tersebut sedang secara bersama melanda Indonesia. Masa sekarang ini adalah masa kritis dalam perkembangan keberlanjutan NKRI, untuk itu kesadaran bersama atas semua hal tersebut perlu ditindak lanjuti dengan langkah arif dari bangsa ini.

Dengan demikian dalam pengembangan rawa di Indonesia, perlu dikaitkan dengan semua isu permasalahan tersebut diatas. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak potensi dan fungsi rawa di Indonesia, yang terkait dengan persyaratan suatu pembangunan negara yang berkelanjutan, belum diberdayakan secara optimal. Dengan demikian didalam manajemen pembangunan Nasional sangat tepat kiranya apabila rawa diletakkan pada posisi yang cukup strategis.

SEKILAS GAGASAN

Kondisi keterpurukan bangsa dan negara Indonesia akhir-akhir ini, selayaknya mendorong upaya untuk lebih menguasai dan memberdayakan potensi sumberdaya alam khususnya rawa. Kearifan Lokal yang lahir dari budaya suku Dayak, Bugis, Banjar, Melayu dan suku-suku bangsa lainnya yang tinggal di daerah pesisir dan rawa telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata didalam masalah ketahanan pangan nasional, sekaligus ikut berperan didalam pembinaan wawasan Nusantara juga penyediaan bahan dasar didalam budidaya agroindustri sesuai dengan kemampuan masing masing daerahnya. Kedepan, SDA yang terkandung didalam rawa dengan penduduknya ditambah pengalamannya juga kearifannya sebagai "social capital" perlu dimanfaatkan dan diberdayakan.

Dari evaluasi sejarahnya sampai saat ini pengembangan daerah rawa termasuk masyarakatnya secara umum telah mampu eksis mempertahankan kehidupannya. Basis kehidupan perekonomian setempat dari hasil kajian ternyata tidak hanya berdasar pada produksi beras/pangan atau "on farm", akan tetapi sudah berkembang ke sektor "off farm", yang untuk sektor ini nyaris telah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Untuk itu kedepan pembinaan juga pengadaan fasilitas dasar guna mendukung pengembangan "off farm" harus menjadi sektor pembangunan yang penting di daerah rawa. Adapun sektor penting tersebut adalah sektor : pendidikan keterampilan, penyediaan air bersih, penyediaan energi

iistrik, aksesibilitas ke pasar, permodalan dan manajemen industri kecil skala rumah tangga.

Adapun sektor strategis yang sangat mendesak untuk diperhatikan adalah "non farm" juga "out farm". Sektor ini diperkirakan akan berkembang pesat dan berakibat terjadinya "brain drain" sehingga dapat membahayakan keberlanjutan dan keamanan masalah ketahanan pangan nasional. Sektor ini melibatkan generasi muda terdidik yang kurang tertarik bekerja di sektor pertanian, besarnya sudah cukup mengkhawatirkan dan perlu adanya langkah penanganan yang bersifat segera, melibatkan banyak sektor dan harus ditangani secara komprehensif.

Masalah kerusakan lingkungan juga telah merupakan ancaman yang cukup serius. Masalah konservasi lingkungan khususnya tanah dan air, perlu penanganan segera, dan hal ini mau tidak mau harus melibatkan kebijakan dalam penetapan arah dan kriteria pengembangan rawa, terutama didalam penetapan luas tanah garapan untuk sawah (2 ha) dan tata ruangnya perlu dikaji ulang dan diintegrasikan kedalam kebijakan penetapan arah pengembangan rawa.

Konsekuensi logis dari tujuan pembangunan secara utuh, maka kesejahteraan masyarakatnya sebagai pelaku utama pembangunan daerah rawa harus selalu diperhatikan. Dengan demikian paradigma pembangunan daerah rawa sudah semestinya tidak hanya dipredikati sebagai lumbung padi atau bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan nasional, akan tetapi juga harus mampu mensejahterakan masyarakatnya dan mengangkat harkat dan martabatnya dalam pergaulan antar suku bangsa atau bangsa. Dengan demikian visi pembangunan rawa di Indonesia adalah "terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakatnya secara berkelanjutan". Disamping itu diharapkan dari daerah rawa akan mampu memberikan kontribusi memadai dalam pembangunan nasional. Hal ini tentunya akan merupakan paradigma baru dalam pengembangan daerah rawa dengan pemberian kedaulatan kepada masyarakatnya dalam berperan aktif.

SECERCAH HARAPAN

Kearifan lokal telah membuktikan ketangguhannya didalam pengembangan rawa, yaitu melalui pengembangan "mixed farming", gabungan/sinergi budidaya "on farm" dan "off farm" didalam mendukung peningkatan "income" masyarakat, yang nyaris tanpa bantuan pihak yang berwenang. Dari beberapa kasus di beberapa tempat nilai "off farm" dapat mencapai 40% dari sumber pendapatan petani, dan cenderung akan meningkat mengikuti tuntutan perubahan jaman.

Banyak kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan dan pengalaman para ahli yang terkait dengan bidang pengembangan rawa, yang sampai saat ini belum secara efektif diterapkan. Disamping itu "success and failure stories" yang tersimpan sebagai perbendaharaan kepustakaan di beberapa tempat sudah waktunya untuk

disosialisasikan sebagai pengetahuan publik guna membangkitkan kepercayaan publik termasuk para pengambil kebijakan terhadap peran dan fungsi rawa. Perkembangan ilmu pengetahuan didalam pengembangan lahan basah/rawa kiranya patut disimak dan dikembangkan sesuai kondisi masing masing daerah yang bersifat unik.

Sebagai ilustrasi kondisi permasalahan dan prospek rawa dapat disajikan dibawah.

1. Perkembangan yang ada di daerah sejak dibuka sampai sekarang, ada yang telah berkembang pesat, namun juga ada yang masih lambat belum sesuai dengan harapan. Hal ini diukur dari unjuk kerja indikator tata kehidupan masyarakatnya terutama kesejahteraan dan kondisi lahan usahanya mencakup keberfungsian prasarana yang ada.
2. Dari aspek tanah diperoleh gambaran umum bahwa di beberapa tempat proses reklamasi belum tuntas, dimana ini dapat ditunjukkan dari kondisi lahan yang selalu asam pada musim kemarau. Disamping itu ciri lahan rawa masih kuat, sehingga dengan demikian kesesuaian budidaya pertanian yang ada masih mendasarkan pada kemampuan lahan rawa pada umumnya. Untuk pengembangan jenis budidaya lain yang kompetitif diperlukan penanganan terhadap kondisi tanah secara serius. Khusus untuk tanah "bongkor" (rusak akibat kandungan kesuburan menurun drastis), perlu dilakukan peninjauan kembali peruntukannya dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan upaya rehabilitasi & konservasi.
3. Penerapan teknologi tata air dalam menunjang proses reklamasi dan budidaya pertanian sudah kelihatan hasilnya meskipun belum menyeluruh dan di beberapa tempat berlangsung kurang memuaskan. Ini disebabkan oleh banyak hal terutama kurangnya prasarana pengendali tata air (terjadi "over drain"), kurangnya kegiatan O&P saluran dan bangunan, belum adanya kepastian hukum dalam perlindungan terhadap prasarana, kurangnya koordinasi didalam manajemen lahan termasuk cakupan pengetahuan budidayanya, juga tak kalah pentingnya sistem kelembagaan didalam pemberdayaan prasarana daerah rawa yang sementara ini terasa masih disamakan dengan kondisi didaerah "up land".
4. Dari aspek agronomi menunjukkan bahwa masyarakat masih mengandalkan pencukupan kebutuhan dasarnya berbasis pada produksi padi dan hal ini rata rata sudah berhasil. Adapun kebutuhan standar 100 s/d 125 blek/kk/tahun untuk gabah adalah standar kecukupan yang berlaku didaerah rawa, atau equivalen dengan produksi rerata untuk lahan ± 0.5 ha/th dengan panen 1x/th. Adapun tanaman lain yang sudah berkembang adalah sayur, buah buahan dan tanaman keras. Di beberapa tempat tanaman non padi telah memberikan peningkatan daya dukung perekonomian yang cukup berarti dalam bentuk "off farm income".
5. Dari aspek sosioekonomi menunjukkan gejala beberapa lokasi berkembang menjadi "growth center" bagi perekonomian daerah disekitarnya, meskipun

belum optimal. Disamping itu banyak "lahan tidur" dijumpai dan peruntukan lahan yang belum sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Sesuatu yang perlu pemikiran serius adalah pengembangan "mixed farming". Untuk itu diperlukan kajian tentang manajemen sumberdaya dan aset di masing masing unit, aksesibilitas, permodalan juga pendidikan SDMnya sebagai "human capital".

6. Aspek Tenaga Kerja Produktif menunjukkan gejala terjadinya "drain" tenaga kerja muda terdidik, untuk mencari lapangan kerja diluar daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang kerja yang ada setempat, kurang sesuai dengan kemampuan tenaga kerjanya atau hasil kerjanya kurang memadai untuk menopang kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu dipikirkan program pendidikan ketenaga kerjaan yang mampu bersinergi dengan peluang kerja yang ada setempat. Harapan kedepan "man power planning" untuk daerah rawa harus berorientasi pada mendukung terwujudnya "masyarakat agro business" di daerah rawa.
7. Selain itu dari aspek fisik perlu usaha konservasi lahan terutama pada lahan tidur ataupun lahan yang kurang produktif dengan budidaya yang sesuai dan selaras dengan kondisi perkembangan daerahnya. Disini perlu dilakukan peninjauan tata ruang pemanfaatan rawa dikaitkan dengan berbagai kepentingan, khususnya didalam mengantisipasi tuntutan perubahan jaman, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik maupun lingkungan agar diperoleh nilai kebermanfaatn lahan rawa secara optimal dan berkelanjutan.

Memahami uraian diatas, maka sepantasnya kalau pengembangan rawa diharapkan sebagai lahan masa depan. Untuk menjadikan kenyataan perlu disusun strategi dan komitmen dari para pengambil kebijakan, berarti perlu adanya "political awareness", "political willingness/commitment", "political decision" dan "political action" yang secara berurutan mendukung pengembangan Rawa di Indonesia. Hal ini harus menjadi keputusan politik yang bijak mengingat luasnya daerah rawa dan potensinya belum dikembangkan secara optimal. Adanya kelembagaan khusus yang mengurus pengembangan lahan rawa melalui kerja sinergis antar sektor akan merupakan langkah nyata yang sangat berarti dalam mendukung kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Dari uraian lintasan sejarah dan prospek rawa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini diperlukan langkah konsolidasi yang berarti tindakan memperteguh, memperkuat hubungan antar unsur/aset yang terkait dengan pengembangan rawa agar menjadi kesatuan potensi yang dipunyai rawa lebih

berdaya untuk suatu orientasi peruntukan yang diinginkan, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

Disamping itu juga diperlukan upaya revitalisasi yang berarti menjadikan vital kembali investasi kapital maupun modal lainnya yang oleh sesuatu hal telah mengalami kemunduran fungsi dan manfaatnya, untuk dapat lebih berdaya guna, dalam arti kata berperan penting/strategis kembali sesuai dengan kodrat, kapasitas dan fungsinya, sesuai potensi yang terkandung baik yang berupa kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk merealisasikan suatu kepentingan di masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian perlu dilakukan tindakan serba cakup didalam mendayagunakan potensi sumberdaya lahan rawa baik yang sudah maupun yang akan dikembangkan untuk diberdayakan mengikuti arah pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Adapun hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dapat dirinci seperti tersebut dibawah.

1. Lingkungan fisik-geografis, hal ini dipahami bersifat regime yang harus diterima apa adanya dan potensinya harus "dibaca" dalam bahasa kearifan, pengalaman, kreatifitas, teknologi, perkembangan kepentingan kedepan.
Untuk itu rawa harus dipahami sebagai aset nasional yang mampu mendukung terselenggaranya tata kehidupan berbangsa dan negara yang bermartabat. Disamping itu umumnya rawa sebagai batas identitas wilayah aktivitas agraris dan maritim, juga sebagai area inundasi dan sedimentasi yang dinamis dan berlangsung secara kontinyu/langgeng mengikuti proses daur hidrologi.
2. Kapasitas atau daya dukung rawa, yang berarti kemampuan internal rawa dalam mendukung suatu kepentingan. Didalam perkembangannya respon rawa didalam berinteraksi dengan suatu tindakan, dapat merubah kapasitasnya juga memberikan dampak atas adanya tindakan tersebut. Intervensi teknologi baik didalam sistem struktur maupun non strukturnya sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan kapasitas suatu daerah.
3. Fungsi Ekologis, Sosial-Budaya, Ekonomi, Politis
 - a. Ekologis : Sebagai habitat atau penyangga berlangsungnya daur kehidupan dari berbagai eksistensi mahluk hidupnya. Diperlukan hubungan seimbang sesuai dengan fungsi kodratnya, terutama diantara proses penyediaan unsur pokok kehidupan misalnya : bahan pangan, air dan oksigen/udara.
 - b. Sosial Budaya yang berarti sebagai ruang kehidupan manusia berlangsung dan berkembang. Rawa berpotensi menjadi pusat kebudayaan, terbukti dengan munculnya kota kota besar didaerah rawa. Dari sejarahnya rawa selalu berperan sentral sebagai pusat pertumbuhan wilayah/pulau di Indonesia. Contoh sejarah dapat diungkapkan misal : Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, dlsb. Perkembangan kota kota

- tersebut selalu berperan sebagai lokomotif perkembangan sosial budaya daerah penyangganya (hinterland).
- c. Ekonomi : Rawa sebagai lahan produksi baik untuk kebutuhan dasar maupun non dasar dari komoditas perdagangan. Selain itu juga sebagai simpul aksesibilitas perdagangan antar pulau yang berpotensi. sebagai pintu gerbang. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah, fungsinya didalam memfasilitasi sistem akses hubungan kedalam maupun keluar menjadi sangat strategis.
 - d. Politis : Sebagai batas sekaligus lintasan kepentingan agraris-maritime-niaga dalam berinteraksi, jalur interaksi dalam pergaulan antar suku bangsa atau bangsa yang beridentitas. Pintu gerbang interaksi antar pulau, antar suku bangsa bahkan antar bangsa dan negara Hal ini membuktikan bahwa rawa secara politis perlu mendapatkan penegasan menjadi lahan andalan untuk mencapai tujuan mengisi kemerdekaan bangsa dan NKRI. Untuk itu "Road Map" menuju rawa yang berdaya guna harus segera disusun dalam bentuk rencana strategi yang berbasis pada jati diri dan potensi rawa. Dan hal itu harus menjadi keputusan politik sebagai payung dan pedoman kerja para pelaksananya/pemerintah juga pihak pihak yang berkepentingan termasuk masyarakatnya.

PERSEMBANHAN UNTUK INDONESIA

Seiring dengan pergeseran budaya dari masyarakat pemanen menjadi masyarakat berbudidaya, maka tulisan ini dipersembahkan. Dengan demikian sumbangan pikiran ini disampaikan untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi para penentu kebijakan politik khususnya dalam pengembangan potensi rawa untuk mewujudkan suatu negara maritim-agraris-niaga yang kuat, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Belajar dari sejarah bangsa Indonesia sejak kerajaan Sriwidjaja, Kutai Kertanegara, Syailendra, Majapahit, dlsb. sampai dengan PLG-sejuta hektar, banyak "success story" pengembangan rawa telah diperoleh, selain itu peristiwa kegagalan tidak perlu menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Sukses dan gagal sepantasnya menjadi pelajaran yang unik yang perlu dipadukan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang dan prospek kemungkinan pengembangannya dimasa datang. Dengan demikian kebijakan untuk mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini akan menjadi lebih realistis dan dapat dipertanggung jawabkan kepada generasi mendatang.

PENUTUP

Sebagai sumbangan pikiran untuk pengambil kebijakan, tulisan ini disampaikan untuk acuan didalam penetapan konsep dan arah pembangunan rawa di Indonesia, semoga bermanfaat dan diterima apa adanya.